

Jokowi Pastikan Upacara 17 Agustus di IKN Sudah Terencana Secara Detil

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pastikan hingga saat ini tidak ada masalah berarti yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Tak hanya itu, Kepala Negara juga memastikan bahwa acara pelaksanaan Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 sudah dirancang secara detail.

"Enggak ada masalah. Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini, kemudian acara juga sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari sudah hampir final," ujar Jokowi dalam keterangannya, Jumat (1/3).

Jokowi pun mengaku telah berencana untuk berkantor di IKN segera setelah infrastruktur pendukung transportasi di IKN selesai dibangun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Basuki Hadimuljono disebutkan akan berkantor di IKN mulai pertengahan tahun 2024.

"Pak Basuki Juni, Juli. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi," kata Jokowi.

Sedangkan untuk pemindahan aparat sipil negara (ASN) ke IKN akan dilakukan secara bertahap seiring dengan penyediaan fasilitas pendukung bagi ASN.

"Misalnya, perumahan yang paling penting, kemudian sekolah untuk anak-anak beliau-beliau yang pindah ke sini, rumah sakit kalau ada yang sakit misalnya. Sehingga semua ini harus dikelola, manajemen seperti ini tidak gampang. Ini yang sedang kita siapkan," jelasnya.

Presiden pun menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan menjadi kota yang hidup dalam satu dekade ke depan. "Kita perkirakan dalam 10 tahun kota ini akan menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh masyarakat kita," ungkapnya. ● han

Mahfud MD Pastikan Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK, Klaim Punya Bukti

JAKARTA (IM) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku bahwa pihaknya sudah siap untuk mengajukan gugatan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, Tim Pemantauan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini, termasuk menyiapkan berkas kelengkapan.

"Kalau kami sudah siap. TPN, kami, tim hukum kami, sudah siap, sudah lengkap. (Kalau) sekarang MK buka, kita langsung daftar," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (1/3).

Saat ini tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional. Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

Sementara, gugatan

perselisihan hasil pemilu baru dibuka tiga hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, tepatnya 23 Maret 2024. Oleh karenanya, Mahfud menyebut, pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024. Sejalan dengan itu, TPN Ganjar-Mahfud terus melakukan persiapan.

Jadi jangan dibilang "Kok diam aja". Enggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU. Keputusan siapa yang angkanya terbanyak, baru tiga hari sesudah itu sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus," ujarnya.

Mahfud menyebut bahwa pihaknya juga tengah bersiap untuk merealisasikan pengenaan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bilang, lantaran dirinya bukan anggota partai politik maupun legislator, ia tak ikut langsung dalam mengusulkan hak angket. Namun, Mahfud turut memberikan saran terkait ini. ● han

Kasus Oknum Dokter Diduga Cabuli Istri Pasien Naik ke Tahap Penyidikan

PALEMBANG (IM) - Kasus oknum dokter berinisial MY DI Palembang, yang diduga mencabuli istri pasien berinisial TAF naik ke penyidikan. Namun, polisi belum menetapkan tersangkanya.

Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes M Anwar Reksowidjojo mengatakan, gelar perkara dilakukan pihaknya pada Kamis (29/2) telah rampung hingga menaikkan kasus tersebut ke penyidikan.

"Iya, gelar perkara sudah," kata Kombes Anwar dikonfirmasi wartawan, Jumat (1/3).

Sesuai ketentuan, apabila dari hasil gelar perkara ditemukan unsur pidana yang dikuatkan dengan alat bukti dan keterangan saksi dalam sebuah perkara, maka secara otomatis status perkara dapat naik satu tingkat ke tahap penyidikan.

Terkait hal itu, Anwar memastikan pasca gelar perkara yang dilaksanakan saat ini, kasus tersebut statusnya sudah ditahap penyidikan. Selanjutnya, polisi akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Intinya sudah naik ke tahap penyidikan," jelasnya.

Penyidikan itu untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu, membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

"Naik tahap penyidikan saja. Untuk penetapan tersangka belum," ujarnya. Sebelumnya, Anwar

sendiri mengatakan jika pihaknya tengah melakukan gelar perkara kasus tersebut tengah berlangsung. Anwar berjanji akan menyampaikan hasilnya jika proses tersebut rampung.

"Untuk gelar (perkara) sudah, lagi on progress. Nanti diinformasikan," katanya, Kamis (29/2).

Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan ketiga terhadap TAF dan suaminya. Hal itu disampaikan kuasa hukum TAF, Febriansyah. Tak hanya sekedar memberikan keterangan, kedatangan pasutri itu juga diminta polisi untuk membawa pakaian yang dikenakan TAF saat malam kejadian. Sementara TAF sendiri akan dilakukan pemeriksaan medis.

Diketahui, peristiwa yang dialami TAF (22) itu terjadi saat korban sedang menjaga suaminya yang dirawat di RS di Jalan Gubernur HA Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Rabu (20/12/2023) malam.

Tak terima atas perbuatannya sang dokter, korban lalu melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Kasubdit PPA Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Reksowidjojo Anggraini membenarkan, pihaknya telah menerima laporan TAF terkait kejadian itu. ● lus

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Desak Kapolri Segera Tahan Firli Bahuri

EKS Ketua KPK Abraham Samad menyebut Firli perlu ditahan sebagai wujud nyata bahwa Polri menerapkan azas hukum *equality before the law*.

JAKARTA (IM) - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/3). Mereka menyampaikan surat untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena menilai penanganan perkara dugaan pemerasan yang menjerat eks Ketua KPK Firli Bahuri berjalan lambat.

Beberapa anggota koalisi yang datang ke Mabes Polri di antaranya, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Ketua PBHI Julius Ibrani, serta sejumlah eks pimpinan KPK seperti Abraham Samad, Saut Situmorang, dan Mochamad Jasir.

Lepas Pasukan Perdamaian, Panglima TNI Wanti-wanti Konflik Israel-Hezbollah di Lebanon

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mewanti-wanti soal konflik di perbatasan Israel dan Palestina ketika melepas prajurit pasukan perdamaian ke Lebanon.

Pesan itu disampaikan melalui Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan yang memimpin upacara pelepasan Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) beserta Milstaff Seceast United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) TA. 2024 di Plaza Mabes TNI, Jakarta, Kamis (29/2).

Dalam amanatnya, Panglima Agus mengungkapkan bahwa situasi di perbatasan Israel dan Palestina kembali memanas sejak 7 Oktober 2023 dan berimbas pada situasi di Lebanon Selatan. Ini karena konflik antara Israel Defence Forces (IDF) dan kelompok paramiliter di

Lebanon, Hezbollah. "Saling serang antara IDF dan Hezbollah membuat situasi di Blue Line memanas," kata Agus dalam siaran pers Puspren TNI, Jumat (1/3).

Hal ini, menurut Panglima TNI, dapat meningkatkan ketegangan dan eskalasi konflik di Timur Tengah yang juga mempengaruhi konflik Israel-Hezbollah.

"Oleh sebab itu, sesuai dengan dinamika situasi keamanan di daerah misi, seluruh prajurit harus selalu mengikuti perkembangan situasi yang terjadi," ujar Agus.

Agus juga menekankan kepada semua prajurit agar selama melaksanakan tugas di daerah misi, selalu memperhatikan faktor keamanan, melaksanakan kegiatan sesuai prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) yang berlaku, dan melaporkan se-

Seperti diketahui, Firli sudah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo oleh penyidik Polda Metro Jaya sejak 22 November 2023 lalu.

Apalagi, menurut Samad, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli ditetapkan oleh Kepolisian itu termasuk kategori kejahatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan.

"Kenapa kita katakan berjalan ditentang, karena sampai hari ini kita lihat enggak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang signifikan, misalnya harusnya dilakukan penahanan," ujarnya.

Di sisi lain, Samad mengakui bahwa penyidik memiliki alasan subyektif untuk tidak menahan seorang tersangka. Meski begitu, Samad menilai

pasal yang disangka kepada Firli Bahuri sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan.

Samad menilai Firli perlu ditahan sebagai wujud nyata bahwa penyidik Polri menerapkan azas hukum *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Terlebih, Firli Bahuri diketahui merupakan purnawirawan jenderal bintang tiga yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPK.

"Kalau masyarakat biasa yang disidik oleh Kepolisian itu cepat-cepat ditahan. Tapi, kalau Firli Bahuri dia Mantan Ketua KPK itu diberikan privilege keistimewaan-keistimewaan sehingga beliau tidak dilakukan penahanan," kata Samad.

"Ini bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap *law enforcement* penegakan hukum," katanya meanambahkan.

Dalam pengusutan kasus

REKAPITULASI SUARA LUAR NEGERI TINGKAT NASIONAL

Komisioner KPU Mochamad Afifuddin (tengah) bersama Idham Holik (kanan) dan August Mellaz (kiri) memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/3). KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pemungutan suara luar negeri tingkat nasional, dan hingga 1 Maret 2024 pukul 15.00 KPU telah melakukan perhitungan suara di 31 PPLN.

Andhi Pramono Akui Menggunakan Rekening *Cleaning Service* dan *Security*

JAKARTA (IM) - Mantan Kepala Bea-Cukai Makassar, Andhi Pramono, mengakui memakai rekening bank milik *cleaning service* hingga sekuriti saat bertransaksi. Hal itu terungkap dalam persidangan saat Andhi diperiksa sebagai terdakwa.

Mulanya, jaksa menanyakan penerimaan setoran Rp 160 juta dari *cleaning service* bernama Taufik Hidayat pada 2020. Andhi mengatakan Taufik merupakan petugas *cleaning service* di kantor Bea-Cukai Jakarta.

"Pada tanggal 28 Desember 2020 ketika Saudara bertugas di Kanwil BC Jakarta?" tanya jaksa dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Jumat (1/3).

"2020 betul, saya di Jakarta Ibu," jawab Andhi.

"Iya, Kepala Bidang Kepabeanan, itu ada setoran masuk ke rekening bank Andhi Pramono dari Taufik Hidayat, *cleaning service*, jumlahnya Rp 160 juta. Apa penjelasan Saudara terhadap penerimaan ini?" tanya jaksa. "Taufik Hidayat adalah salah satu *cleaning service* yang ada di Kantor Bea-Cukai Jakarta. Saya minta tolong untuk menyetorkan uang itu," jawab Andhi.

Andhi mengaku uang itu dari seorang pengusaha bernama Sia Leng Salem, yang bekerja sama dengannya.

Selain itu, Andhi juga mengaku menggunakan rekening sekuriti bernama Yanto Andar. Jaksa menyebut ada transaksi setoran Rp 814.500.000 ke Yanto Andar pada 2021 hingga 2022.

"Yanto Andar ini rekening baru yang saya minta dari teman saya, Bu, sebagai penutupan usaha saya dengan Pak Salem, jadi rekening ini saya sampaikan kepada Pak Salem

untuk menerima sisa-sisa usaha yang ada di Singapura. Jadi sama Pak Salem, semua sisa-sisanya dikirim ke sini," jawab Andhi.

Andhi mengatakan saat itu Yanto berada di Jakarta sementara dirinya berada di Makassar. Dia mengatakan uang yang dikirim ke rekening Yanto Andar itu diterimanya dari Sia Leng Salem.

"Di sini tanggal 6 Desember Rp 100 juta, kalau Yanto Andar dia ada di mana lokasinya?" tanya jaksa.

"Yanto Andar ada di Jakarta, Bu," jawab Andhi.

"Saudara waktu itu di Makassar, ya?" tanya jaksa.

"Ada di Makassar, betul," jawab Andhi.

"Ini ada 6 Desember Rp 100 juta, 7 Desember Rp 127.500.000, 17 Desember 2021 itu Rp 100 juta, 24 Maret, itu keterangan Saudara ini dari Sia Leng Salem tetap?" tanya jaksa.

"Iya, karena tahun 2018 itu Pak Salem sudah sakit, terus mau tutup kerja sama saya dengan Pak Salem, mulailah saya banyak terima uang, baik dari dolar maupun rupiah tadi, Bu, 2018, 2019, 2020, 2021 terakhir. Sisanya mereka minta satu rekening lagi untuk tutup sisa-sisa yang ada di tahun 2021, 2022," jawab Andhi.

Mantan Kepala Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono (AP) didakwa menerima gratifikasi dengan total Rp 58,9 miliar. Gratifikasi itu diterima Andhi dalam bentuk mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

Uang itu diterima dengan tiga mata uang yang berbeda. Uang itu terdiri atas Rp 50,2 miliar, USD 264.500 atau sekitar Rp 3,8 miliar, dan SGD 409 ribu atau sekitar Rp 4,8 miliar. ● han



LOMBA LARI LINTAS ALAM PRAJURIT KORPS MARINIR

Prajurit Korps Marinir TNI AL mengikuti lomba lari lintas alam dengan menggunakan perlengkapan tempur berjarak sekitar 8 km di Gedangan, Sidoarjo, Jatim, Jumat (1/3). Lomba bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan ketahanan fisik serta melatih kepercayaan diri bagi setiap prajurit dalam menyoong tugas.